



# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUDIRO

: KUASA PENGGUNA ANGGARAN 2. Jabatan

3. NHK : 206743

### II. DATA HARTA

#### A. TANAH DAN BANGUNAN

1.671.828.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 1047 m2/77 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 169.614.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/21 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 128.500.000
- 3. Tanah Seluas 845 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 135.200.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 655 m2/189 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 83.840.000
- Tanah Seluas 1085 m2 di BOYOLALI, WARISAN Rp. 88.970.000
- 6. Tanah Seluas 550 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 256.100.000
- Tanah Seluas 1660 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 170.980.000
- Tanah Seluas 2443 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 201.228.000
- Tanah Seluas 3692 m2 di GROBOGAN, WARISAN 302.744.000
- 10. Tanah Seluas 147 m2 di KOTA SURAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 134.652.000

## **ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

252.500.000

MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000







- MOTOR, HONDA VARIO BEBEK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
- MOTOR, HONDA SCOOPY BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
- MOTOR, HONDA SCOOPY BEBEK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
- MOBIL, HONDA JAZZ SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	348.205.500
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	420.655.441
F. HARTA LAINNYA	Rp.	Kerry Kerry
Sub Total	Rp.	2.693.188.941
III. HUTANG	Rp.	COK CH
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.693.188.941

# Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.